

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIGI SEBAGAI DAERAH OTONOM BARU HASIL PEMEKARAN

Fredi Alvianto, Andi Mattulada Amir, Vita Yanti Fattah

eskinosen@yahoo.co.id

Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

Study on financial ability of Sigi Regency as new autonomous region resulting from regional proliferation has been carried out. The present study, the financial ability region is measured by 1). Fiscal Decentralization Degree (DDF) 2). Fiscal Need 3). Fiscal Capacity 4). Fiscal Effort 5). Effectiveness of Local Revenue 6). Region Financial Independency Ratio used data from 2010 to 2015. The result exhibited that financial ability of Sigi Regency is very low, so that the dependence of financial with central government is still very high.

Keywords: *Fiscal Decentralization Degree, Fiscal Need, Fiscal Capacity, Region Financial Independency*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi daerahnya sendiri dan menggali sumber dana yang ada dan potensial guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya. Oleh karena itu mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah diutamakan semaksimal mungkin

berasal dari potensi penerimaan asli daerah (PAD) baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya diperoleh hasil bahwa hampir semua daerah di Indonesia memiliki derajat desentralisasi di bidang keuangan yang rendah. Untuk itu strategi pembiayaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah. Menurut Halim (2007: 262), suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah dapat dilihat dari (1) Kemampuan suatu daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Tingkat ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kabupaten Sigi merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Donggala sebagai kabupaten induk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008. Kabupaten Sigi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan kabupaten yang memiliki posisi strategis sebagai penyangga kebutuhan Kota Palu dan sangat berperan dalam menunjang kegiatan perekonomian dan pembangunan di Sulawesi Tengah.

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah termasuk Kabupaten Sigi sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Otonomi Daerah membawa konsekuensi pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut melatarbelakangi untuk dilakukan penelitian mengenai Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sigi Sebagai Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran pada Tahun 2010 sampai 2015.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini berbentuk survey atas data sekunder.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2016.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai data kuantitatif dan merupakan data runtun waktu (time series) yang diperoleh dari beberapa sumber. Data

sekunder yang digunakan diperoleh dari DPPKAD Kabupaten Sigi dan BPS Kabupaten Sigi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan atau *library research*.

Instrumen Analisis

Alat analisis data yang digunakan adalah:

1) Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat diukur menggunakan formula yaitu (Musgrave dan Musgrave 1991:68 dalam Halim (2007)):

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

Dengan $TPD = PAD + BHPBP + SB$

2) Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need/KbF*)

Kebutuhan Fiskal (*fiscal need*) dapat diukur dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik Per Kapita (IPPP) dengan formula (Tangkilisan, 2005):

$$IPPP = \frac{\text{Pengeluaran Publik Per Kapita Untuk Jasa Publik}}{\text{Standar Kebutuhan Fiskal Daerah (SKFD)}}$$

$$SKFD = \frac{\text{Jml Pengeluaran Daerah/Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kabupaten}}$$

3) Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity/KaF*)

Kapasitas Fiskal (*fiscal capacity*) dapat diukur dengan menggunakan formula (Tangkilisan, 2005):

$$FC = \frac{\text{PDRB/Jumlah Penduduk}}{\text{Kapasitas Fiskal Standar}}$$

$$KFs = \frac{\text{PDRB Sulteng/Jml Penduduk Sulteng}}{\text{Jumlah Kabupaten}}$$

4) Upaya / Posisi Fiskal (*Tax Effort*)

Upaya/Posisi Fiskal suatu daerah dihitung dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB.

$$\text{Elastisitas PAD} = \frac{\Delta \text{PAD}}{\Delta \text{PDRB}} \frac{\text{PAD}}{\text{PDRB}}$$

Dimana e = elastisitas; Δ = perubahan

Makin tinggi hasilnya, makin baik struktur PAD-nya.

5) Rasio Efektivitas PAD

Perhitungan Efektivitas PAD menggunakan rumus (Mahardika):
 Rasio Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$

6) Rasio Derajat Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengetahui tingkat ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat (Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah) dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Abdul Halim, 2007):

$$DKD = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pengeluaran Daerah}} \times 100\%$$

Jika hasilnya tinggi, maka peranan PAD dalam membiayai urusan daerah dinyatakan mampu untuk menunjang kemandirian keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan APBD Kabupaten Sigi

APBD merupakan sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah agar terwujud pembangunan daerah. Pada Grafik 4.1 dapat dilihat perkembangan APBD Kabupaten Sigi yang menunjukkan tren kenaikan pada setiap tahunnya meskipun persentase kenaikannya sangat bervariasi. Pertumbuhan APBD terbesar terlihat pada tahun 2015 diikuti tahun 2014 dan terkecil pada tahun 2012.

Tabel 1. Perkembangan APBD Kabupaten Sigi (rupiah)

NO	TAH UN	APBD	% PERTUMBUHAN
1	2010	498.959.577.556	-
2	2011	596.621.369.639	19,57
3	2012	640.712.543.988	7,39
4	2013	697.610.018.871	8,88
5	2014	795.366.079.045	14,01
6	2015	1.027.934.523.332	29,24

Sumber: Ringkasan APBDP Kab. Sigi, Data Diolah.

APBD Kabupaten Sigi menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sangat bervariasi.

Tabel 1 menunjukkan persentase kenaikan APBD tertinggi pada tahun 2015. Kenaikan tersebut terkait dengan meningkatnya pembiayaan terhadap pengeluaran rutin maupun pembangunan dimana ada penambahan dana transfer melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Kenaikan terkecil terjadi pada tahun 2012, hal ini terkait dengan kebutuhan belanja daerah yang semakin relatif tetap.

Indonesia menganut asas desentralisasi yang memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan asas-asas pelayanan publik yang di dalamnya meliputi : transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban.

Setiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugasnya wajib mempunyai perencanaan yang disusun dan akan dijadikan pedoman pada saat melaksanakan tugas. Oleh karena itu pemerintah merumuskan berbagai kebijakan yang diatur dalam bentuk anggaran. Di dalam anggaran akan dapat dilihat seberapa besar fungsi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.

1). Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sigi (DDF)

Hasil perhitungan seperti terlihat pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap TPD terus meningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2015, akan tetapi sedikit

mengalami penurunan pada tahun 2013. Hasil rasio PAD terhadap TPD tertinggi adalah di tahun 2015 dengan nilai sebesar 44,21%, dan yang terendah adalah di tahun 2011 dengan nilai sebesar 7,28%. Apabila dilihat secara

rata-rata, hasil rasionya adalah 17,38%. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sigi secara rata-rata dari tahun 2010-2015, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Sigi dapat dikatakan Kurang.

Tabel 2. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015

Tahun	PAD	Total Penerimaan Daerah	DDF (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
2010	10.067.260.077	114.213.588.736	8,81	Sangat Kurang
2011	10.261.268.565	140.943.918.145	7,28	Sangat Kurang
2012	11.582.482.885	87.150.260.890	13,29	Kurang
2013	13.798.177.820	106.684.326.514	12,93	Kurang
2014	23.589.026.448	133.099.197.234	17,72	Kurang
2015	25.506.504.287	57.695.946.103	44,21	Baik
Rata-Rata			17,38	Kurang

Sumber: Dari berbagai sumber, data diolah.

2). Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need/KbF*) Kabupaten Sigi

Kebutuhan Fiskal menggambarkan seberapa besar kebutuhan per kapita penduduk jika jumlah seluruh pengeluaran dibagi secara adil kepada seluruh penduduk daerah tersebut. Kebutuhan Fiskal juga menunjukkan besarnya indeks pelayanan publik per kapita. Tabel 3 menunjukkan bahwa dari tahun 2010-2015 rata-rata

kebutuhan fiskal standar Se-Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp. 242.992. Kebutuhan fiskal Kabupaten Sigi sebesar 12. hal ini menunjukkan Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP) Kabupaten Sigi adalah sebesar 12 dan kebutuhan fiskal Kabupaten Sigi 12 kali lebih besar dari rata-rata kebutuhan standar Se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 3. Perhitungan Kebutuhan Fiskal Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015

Tahun	Pengeluaran Daerah		Jumlah Penduduk		Jumlah Kabupaten	SKFD	KbF
	Kab. Sigi	Prov. Sulteng	Kab. Sigi	Prov. Sulteng			
2010	498.959.577.556	5.655.611.000.000	215.030	2.635.009	10	214.633	11
2011	596.621.369.639	6.513.764.000.000	219.005	2.683.722	11	220.649	12
2012	605.865.824.000	7.233.392.000.000	220.061	2.729.227	11	240.940	11
2013	661.992.088.489	7.880.029.749.000	224.214	2.785.488	13	217.612	14
2014	747.623.458.900	8.975.514.871.000	226.876	2.831.283	13	243.856	14
2015	840.204.368.000	11.976.819.961.000	229.474	2.876.689	13	320.262	11
Rata-Rata						242.992	12

Sumber: Dari berbagai sumber, data diolah.

3). Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity/KaF*) Kabupaten Sigi

Kapasitas Fiskal menunjukkan berapa besar usaha dari daerah yang diwujudkan dalam PDRB untuk memenuhi semua kebutuhannya, dalam hal ini adalah total pengeluaran daerah. Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata kapasitas fiskal standar Se-Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2010-2015 adalah Rp2.312.322. Sedangkan

kapasitas fiskal standar Kabupaten Sigi sebesar 9. Kabupaten Sigi memiliki kapasitas fiskal yang lebih kecil dibanding kebutuhan fiskalnya (9 : 12). Selisih kurang ini melalui perhitungan DAU dapat ditutup melalui mekanisme transfer dari pemerintah pusat, sehingga dengan demikian Kabupaten Sigi masih mempunyai ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Tabel 4. Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015

Tahun	PDRB		Jumlah Penduduk		Jumlah Kabupaten	KFs	FC
	Kab. Sigi	Prov. Sulteng	Kab. Sigi	Prov. Sulteng			
2010	3.139.780.000.000	51.752.071.000.000	215.030	2.635.009	10	1.964.019	7
2011	3.555.500.000.000	60.716.295.000.000	219.005	2.683.722	11	2.056.719	8
2012	4.823.589.000.000	69.637.921.000.000	220.061	2.729.227	11	2.319.602	9
2013	5.401.524.000.000	79.820.375.000.000	224.214	2.785.488	13	2.204.292	11
2014	6.066.814.000.000	90.255.667.000.000	226.876	2.831.283	13	2.452.155	11
2015	6.686.765.200.000	107.596.438.000.000	229.474	2.876.689	13	2.877.144	10
Rata-Rata						2.312.322	9

Sumber: Dari berbagai sumber, data diolah.

4). Upaya/Posisi Fiskal (*Tax Effort*) Kabupaten Sigi

Posisi Fiskal suatu daerah dihitung dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tertentu. Hasil perhitungan seperti pada Tabel 5 menunjukkan bahwa dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, laju pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD meskipun terlihat pengaruhnya, yaitu bila PDRB meningkat 1% maka PAD akan meningkat sebesar 1,35%.

Tabel 5. Perhitungan Upaya Fiskal Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015

Tahun	Pertumbuhan (%)		Elastisitas PAD
	PAD	PDRB	
2010	-	-	-
2011	2	13	0,15
2012	13	36	0,36
2013	19	12	1,60
2014	71	12	5,76
2015	8	10	0,80
Rata-Rata	23	17	1,35

Sumber: Dari berbagai sumber, data diolah.

5). Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sigi

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam

merealisasikan PAD berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disesuaikan dengan potensi riil daerahnya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dikategorikan efektif bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100% (seratus persen). Semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang semakin baik pula. Tabel 6 menunjukkan bahwa secara

rata-rata dari tahun 2010-2015, rasio Efektivitas PAD sebesar 94,72% menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dikategorikan belum efektif, meskipun pada Tahun 2013-2015 pencapaian target PAD melewati 100%. Pencapaian target PAD pada kurun waktu 2010-2012 yang belum optimal disebabkan oleh banyak potensi riil PAD belum digali secara maksimal.

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Efektivitas PAD (%)
2010	8.021.741.996	10.067.260.077	79,68
2011	7.350.462.235	10.261.268.565	71,63
2012	11.444.098.005	11.582.482.885	98,81
2013	14.801.879.767	13.798.177.820	107,27
2014	24.894.901.154	23.589.026.448	105,54
2015	26.881.600.327	25.506.504.287	105,39
Rata-Rata			94,72

Sumber: Dari berbagai sumber, data diolah.

6). Rasio Derajat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sigi

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah dapat juga menggambarkan sampai seberapa besar tingkat ketergantungan finansial Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sigi dihitung dengan membandingkan penerimaan PAD terhadap total pengeluaran daerah. Mengenai pola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada 4 hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Abdul, 2007), yaitu: 1) Pola Hubungan Instruktif, dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah

(daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah), 2) Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi, 3) Pola Hubungan Partisipatif, dimana peran Pemerintah Pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. 4) Pola Hubungan Delegatif, dimana campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut hasil perhitungan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sigi dari tahun 2010-2015 seperti pada Tabel 7 terlihat bahwa kemandirian daerah Kabupaten Sigi dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial

masyarakat masih sangat rendah. Tingkat Kesiapan Otonomi Daerah dikatakan Sangat Rendah apabila Derajat Kemandirian menunjukkan persentase di bawah 25%, ini berarti Kabupaten Sigi memiliki pola

hubungan yang bersifat instruktif terhadap pemerintah pusat, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dibanding kemandirian pemerintah daerah.

Tabel 7. Perhitungan Rasio Derajat Kemandirian Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015

Tahun	PAD	Total Pengeluaran Daerah	DKD (%)	Pola Hubungan	Tingkat Kesiapan Otonomi Daerah
2010	10.067.260.077	498.959.577.556	2,02	Instruktif	Sangat Rendah
2011	10.261.268.565	596.621.369.639	1,72	Instruktif	Sangat Rendah
2012	11.582.482.885	605.865.824.000	1,91	Instruktif	Sangat Rendah
2013	13.798.177.820	661.992.088.489	2,08	Instruktif	Sangat Rendah
2014	23.589.026.448	747.623.458.900	3,16	Instruktif	Sangat Rendah
2015	25.506.504.287	840.204.368.000	3,04	Instruktif	Sangat Rendah
Rata-Rata			2,32	Instruktif	Sangat Rendah

Sumber: Dari berbagai sumber, data diolah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan alat analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Upaya Fiskal, Rasio Efektivitas PAD dan Derajat Kemandirian Keuangan Daerah, dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sigi Masih Sangat Kurang.

Rekomendasi

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penyusunan Tesis "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sigi Sebagai Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran" adalah sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi rill PAD baik dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang potensial dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah Kabupaten Sigi dalam bidang fiskal.

2) Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor baik lokal maupun asing guna menanamkan modalnya di Kabupaten Sigi sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatnya PDRB.

3) Mengoptimalkan peran BUMD yang merupakan salah satu sumber penghasil PAD dengan menempatkan tenaga profesional dalam bidang tugasnya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing dan seluruh Dosen di Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu segala bentuk masukan diperlukan dalam rangka penyempurnaan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Halim, A. & Theresia, D. (Eds.). 2007. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi kedua. Jakarta: STIM YKPN.
- Mahardika, I.G.S. dan Luh, G.S.A. 2012. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. *Penelitian* tidak diterbitkan. Bali.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Tangkilisan, H.N.S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.